

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu Negara yang terdiri dari banyak pulau dan kaya akan beragam sumber daya alam didalamnya. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tersebut akan membawa negara Indonesia menuju perbaikan yang lebih baik. Akan tetapi Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang dan menghadapi sejumlah isu serta spekulasi terkait permasalahan sosial, budaya dan ekonomi yang perlu diteliti secara mendalam. Salah satu aspek yang termasuk dalam permasalahan tersebut adalah kemiskinan.<sup>2</sup>

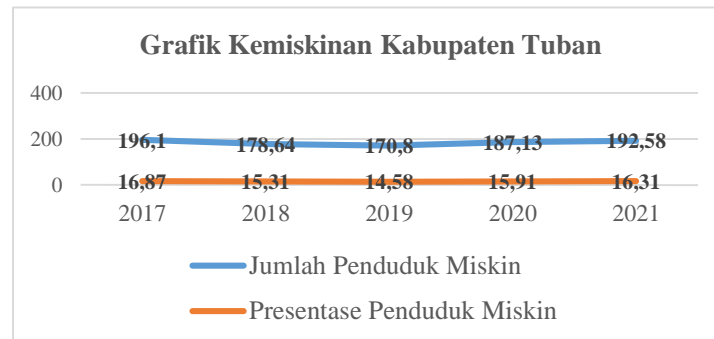
Gambar 1.1 Grafik Kemiskinan di Indonesia 2017-2022<sup>3</sup>



<sup>2</sup> Sari Wulandari, Ahmad Prayendi Dasopang, Ginie Aulia Rawani, Idzul Hasfizetty, Muhammad Yunus Sofian, Reni Dwijaya, Selfia Rachmalija, “Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 10, (2022), 3209-3218.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik 2023, *Produksi Berita Resmi Statistik-Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*, dilihat pada 5 Januari 2024, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>

Dapat dilihat dari data statistik diatas, bahwa jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin di Indonesia mengalami naik turun. Tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 25,14 juta di bulan Maret dan 24,78 juta di bulan September dengan presentase penduduk miskin 2,41 di bulan Maret dan 9,22 di bulan September. Tahun 2020 menjadi titik balik yang mengejutkan dengan grafik kemiskinan yang naik pesat dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta di bulan Maret dan 27,55 juta di bulan September dengan presentase penduduk miskin 9,78 di bulan Maret dan 10,19 di bulan September. Meskipun sempat mengalami penurunan di bulan Maret tahun 2022 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 26,14 juta dengan presentase penduduk miskin 9,54 akan tetapi di bulan September 2022 grafik kemiskinan di Indonesia menunjukkan peningkatan kembali dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta dengan presentase penduduk miskin 9,57.

Gambar 1. 2 Grafik Kemiskinan di Kabupaten Tuban 2017-2021<sup>4</sup>

Dapat dilihat dari data statistik diatas bahwa jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami naik turun. Pada Tahun 2017 grafik menunjukkan jumlah penduduk miskin 196,1 dengan presentase penduduk miskin 16,87, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2018 grafik menunjukkan jumlah penduduk miskin 178,64 dengan presentase penduduk miskin 15,31, sempat mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2019 grafik menunjukkan jumlah penduduk miskin 170 ,8 dengan presentase penduduk miskin 14,58, akan tetapi pada Tahun 2020 grafik kemiskinan di Kabupaten Tuban kembali meningkat dengan jumlah penduduk miskin 187,13 dan presentase penduduk miskin 15,91, kemudian kembali mengalami kenaikan lagi pada Tahun 2021 dimana grafik menunjukkan jumlah penduduk miskin 192,58 dengan presentase penduduk miskin 16,31.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik 2022, *Produksi Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022-Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Timur*, dilihat pada 5 Januari 2024, <https://jatim.bps.go.id/publication/2022/02/25/33699f6fcd84e0e2a0ad96f0/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2022.html>

Kemiskinan adalah sebuah keadaan dimana kita tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.<sup>5</sup> Jika digariskan secara besar kemiskinan dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu yang pertama aspek primer dan yang kedua aspek sekunder. Aspek primer mencakup kekurangan harta, pengetahuan, keterampilan dan struktur sosial-politik. Sedangkan aspek sekunder melibatkan kelemahan dalam jaringan sosial, akses informasi, dan sumber keuangan.<sup>6</sup>

Menurut Nugroho dan Dahur, kemiskinan adalah keadaan dimana individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan standar yang berlaku, baik secara absolut maupun relatif, dalam suatu wilayah. Dari segi ekonomi, kemiskinan merujuk pada kesenjangan antara daya beli yang rendah dan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi.<sup>7</sup> Jadi dapat disimpulkan kebutuhan dasar memang merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Adapun salah satunya yaitu rumah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap individu, tidak adanya sebuah rumah yang layak untuk dihuni bagi sebuah keluarga akan berdampak pada keterlantaran anggota keluarga.

---

<sup>5</sup> Simson Tondo ,”Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan melalui Program Bedah Rumah”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara – ASIAN*, Vol. 5, No. 2, (2017), 2.

<sup>6</sup> Ayu Setyoo Rini, Lilik Sugiharti, “Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 01, No. 2, (2016), 17-33.

<sup>7</sup> Ayu Setyo Rini, Lilik Sugiharti, “Faktor-faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Vol. 01, No. 02, (2016), 19.

Dalam konteks ini, kemiskinan secara teori menurut pemerintah adalah seseorang yang tidak mampu memiliki rumah yang layak atau RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Menurut ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Pemukiman, rumah layak huni diartikan sebagai tempat tinggal yang memenuhi standar keselamatan bangunan, memiliki luas bangunan minimum yang memadai, serta memperhatikan kesehatan penghuninya, dan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam konteks pemantauan SDGs, indikator rumah layak huni ditentukan oleh lima kriteria, adapun lima kriteria tersebut adalah sanitasi yang layak, akses air minum yang layak, ukuran tempat tinggal yang memadai, ketahanan bangunan, serta keamanan pemukiman. Jika salah satu dari lima indikator diatas tidak memenuhi standar yang ditetapkan, rumah atau tempat tinggal tersebut dianggap tidak layak huni. Hal ini menekankan pentingnya setiap aspek indikator dalam menentukan kelayakan suatu tempat tinggal.<sup>9</sup>

Sanitasi yang layak merupakan salah satu indikator utama rumah bisa dikategorikan sebagai rumah layak huni, dimana akses sanitasi dianggap layak jika menggunakan tangki septik, kloset leher angsa, Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), atau lubang tanah khususnya di daerah

---

<sup>8</sup> Ravinsyah Kesuma, Agus Purwoto, "Pengelompokan Kabupaten/Kota Berdasarkan Indikator Rumah Layak Huni di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020", *Seminar Nasional Official Statistic*, (2022), 995-1004.

<sup>9</sup> Ibid, 997.

pedesaan yang mana ini penting untuk memastikan pengelolaan limbah tetap efektif dan untuk menjaga kebersihan lingkungan.<sup>10</sup> Sedangkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap anitasi layak huni di Kabupaten Tuban mengalami kenaikan jumlah di setiap tahunnya. Diduga di Dusun Karang Dowo Desa Leran Kecamatan Palang Kabupaten Tuban pemerintah mempunyai program bedah rumah tidak layak huni untuk mengatasi kemiskinan melalui perbaikan rumah-rumah yang tidak layak huni. Program ini sudah berjalan dari Tahun 2018.

Gambar 1. 3 Grafik Presentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Huni di Kabupaten Tuban 2016-2021<sup>11</sup>



Dalam diagram yang disajikan di atas bisa di lihat bahwa jumlah realisasi pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni di Tuban

<sup>10</sup> Ibid, 997.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik 2022, *Produksi Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2022-Profil Kemiskinan Provinsi Jawa Timur*, dilihat pada 5 Januari 2024, <https://jatim.bps.go.id/publication/2022/02/25/33699f6fcd84e0e2a0ad96f0/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2022.html>

dalam kurun waktu 6 Tahun terus mengalami kenaikan di setiap Tahunnya. Dengan capaian Tahun 2016 mencapai 68,71 kemudian pada Tahun 2017 meningkat dengan capaian 68,99 selanjutnya Tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 75,49 kembali mengalami peningkatan di Tahun 2019 dengan capaian 77,79 lalu di tahun 2020 mencapai 79,03 dan di tahun 2021 mencapai 83,80.

Dalam Islam, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW memberikan teladan luar biasa bagi para pemimpin. Nabi Muhammad memberikan contoh prinsip-prinsip etika kepemimpinan islam yang menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Para pemimpin seharusnya mengambil pelajaran dari keteladanan beliau untuk menjalankan kepemimpinan dengan integritas, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat.<sup>12</sup> Salah satu upaya nyata yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip tersebut adalah program bedah rumah yang dijalankan oleh pemerintah desa. Program ini merupakan wujud dari mengutamakan kepentingan umat dan juga kepedulian pemimpin terhadap kondisi kehidupan warganya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biasa dikenal dengan sebutan istilah Bedah Rumah merupakan salah satu dari program pemerintah setempat untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak untuk mendapatkan haknya bisa mendapatkan tempat tinggal

---

<sup>12</sup> Muhammad Nur'ain, Nadia Rapih, Nor Syifa, Resti Nur Anisa, "Kepemimpinan Rasulullah SAW", *Jurnal edu-Leadership*, Vol. 3, No.1, (2023), 122-131.

yang layak untuk ditempatinya. Serta sebagai sarana dan upaya untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial serta mengurangi tingkat kemiskinan yang dialami setiap individu didalam sebuah lingkungan desa.<sup>13</sup>

Program bedah rumah ini sudah banyak dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Dusun Karang Dowo Desa Leran Wetan Kecamatan Palang. Tidak sedikit dari salah satu penduduk Dusun Karang Dowo yang sudah dibedahkan rumahnya. Perangkat desa mengupayakan program tersebut dengan maksud tujuan untuk mengupayakan kesejahteraan warga dengan mendapatkan haknya untuk bisa tinggal di rumah yang memang layak untuk ditempati.

Pemerintahan desa adalah bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan ditingkat paling dasar yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memegang fungsi penting sebagai garda terdepan dalam mencapai tujuan negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Efektivitas pemerintahan desa tergantung pada kinerja yang baik dari unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa. Ketidakmampuan bagian-bagian dalam sistem

---

<sup>13</sup> Febriantika Fara Fernanda, Marseto ,Faizatul Laily Nisa, “Peran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Tempuran Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 20, No. 9, (2023), 240-249.



penyelenggara pemerintahan desa untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan hukum dapat menghambat proses pemerintahan.<sup>14</sup>

Dalam teori analisis struktural fungsional yang diperkenalkan oleh Merton, terdapat dua konsep fungsi yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes merupakan hasil-hasil yang nyata dari suatu sistem yang membantu dalam penyesuaian atau adaptasi, dan disadari oleh para partisipan di dalamnya. Sedangkan fungsi laten merupakan hasil-hasil objektif yang tidak disengaja atau tidak disadari oleh partisipan dalam suatu sistem.<sup>15</sup> Dalam hal ini mengkaji fungsi laten merupakan hal yang sangat penting karena hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan kontribusi yang mungkin tidak terlihat secara langsung dalam sebuah sistem atau proses. Fungsi laten seringkali menjadi pondasi yang mendukung berjalannya suatu sistem secara efektif, meskipun tidak selalu terlihat secara jelas. Dengan mengkaji fungsi laten, kita dapat mengidentifikasi potensi perbaikan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil dari suatu sistem atau kegiatan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang fungsi laten juga dapat membantu menghindari kendala-kendala yang mungkin muncul di masa depan, serta memperkuat keberlanjutan dan keberhasilan suatu program atau inisiatif. Oleh karena itu, mengkaji fungsi laten merupakan langkah yang sangat

---

<sup>14</sup> Ombi Romli, Elly Nurlia, "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintah Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, (2017), 37.

<sup>15</sup> Yusuf, Hamdani, and Puji Lestari. "Fungsi Sosial Keberadaan Banyumas Cycling Community (BCC)." *E-Societas* 7.3 (2018).

penting dalam memastikan kesuksesan dan efektivitas dari berbagai aspek kehidupan dan aktivitas.

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengambil fokus di fungsi laten dan fenomena yang dikaji adalah tentang penanggulangan kemiskinan pada program bedah rumah. Yaitu dengan mengangkat judul penelitian “Fungsi laten perangkat desa dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bedah rumah” (Studi kasus Dusun Karang Dowo Desa Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang timbul dari uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program bedah rumah di Dusun Karang Dowo Desa Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana fungsi laten Perangkat Desa dalam pelaksanaan program bedah rumah di Dusun Karang Dowo Desa Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang timbul dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program bedah rumah di Dusun Karang Dowo Desa Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban
2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi laten Perangkat Desa dalam pelaksanaan program bedah rumah di Dusun Karang Dowo Desa Leran Wetan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dibuat, peneliti berharap hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait dan pihak yang memiliki kepentingan yang sama seperti masalah yang diteliti yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dalam mengembangkan pemahaman teoritis tentang peran fungsi laten perangkat desa dalam menanggulangi kemiskinan melalui program bedah rumah. Hal ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana aspek-aspek terkait pengelolaan desa dapat mempengaruhi upaya mengurangi kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat

Keuntungan bagi masyarakat dapat memberikan sokongan yang diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Penelitian ini dapat membuka peluang untuk keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program

tersebut, memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi.

b. Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan dan program bedah rumah yang telah ada, memastikan efektivitasnya dalam menanggulangi kemiskinan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih holistik atau menyeluruh terhadap peran perangkat desa, membantu pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada sejumlah studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Beberapa penelitian tersebut digunakan sebagai dasar dalam tinjauan pustaka. Lima penelitian yang dirujuk dalam tinjauan pustaka tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dari Nyoman Purna dan I Nyoman Sukraaliawan yang berjudul “Pengelolaan Program Bedah Rumah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng” Jurnal Locus Majalah Ilmiah Vol. 13 No. 1, 2021, Universitas Panji Sakti Bali. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan dampak Program Bedah Rumah di Desa Telaga,

Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk pengawasan oleh tim Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini meningkatkan taraf hidup sosial dan ekonomi penerima bantuan, tetapi juga menimbulkan kecenderungan ketergantungan dan kemalasan pada sebagian masyarakat.<sup>16</sup>

2. Penelitian dari Viyulia yang berjudul “Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang”, *Jurnal Niara* Vol.16 No.1, 2023. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang mana penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami esensi dari program BSPS dan dampaknya terhadap upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Temuan menunjukkan bahwa program bantuan rumah swadaya memberikan dampak yang positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Dimana program BSPS sangat membantu masyarakat Pandeglang dalam memperoleh rumah yang layak huni, dan mereka berharap pemerintah terus melanjutkan program ini guna mengurangi tingkat

---

<sup>16</sup>Nyoman Purna dan I Nyoman Sukraaliawan, “Pengelolaan Program Bedah Rumah Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Telaga Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng” *Jurnal Locus Majalah Ilmiah*, Vol. 13 No. 1, (2021).

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan hak mereka untuk memiliki tempat tinggal yang layak.<sup>17</sup>

3. Penelitian dari Jevi Saputra yang berjudul “Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi” *Journal of Shariah Economic Research* Vol.6 No.1, 2022, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian ini membahas tentang evaluasi kesejahteraan masyarakat setelah mendapatkan bantuan perbaikan perumahan serta apakah program bedah rumah memiliki efek yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bedah rumah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin, dan melalui program bedah rumah secara efektif dapat mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>18</sup>
4. Penelitian dari Nengah Sinarta yang berjudul “Program Bedah Rumah Sebagai Bentuk Sosial Untuk Minimalisir Rumah Tidak Layak Huni” *Jurnal Jurnal Abdi Daya* Vol.2 No.1, 2022, Universitas Warmadewa. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya memberikan dukungan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Penelitian ini menggunakan metode survei

---

<sup>17</sup>Viyulia, “Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang”, *Jurnal Niara*, Vol. 16, No. 1, (2023), 1-13.

<sup>18</sup>Jevi Saputra, “Upaya Pemerintah Mengurangi Kemiskinan Dengan Program Bedah Rumah di Kota Jambi”, *Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 6, No. 1, (2022), 241-249.

berbasis kualitatif, melibatkan wawancara dan observasi sebagai pendekatan utama. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa program bedah rumah merupakan salah satu langkah untuk mencapai kesetaraan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di daerah terpencil. Tantangan yang dihadapi adalah kondisi fisik rumah yang mengalami kerusakan parah dan lingkungan sekitar yang tidak layak huni. Sebagai solusi, program bedah rumah dilakukan dengan harapan memberikan dampak positif bagi masyarakat.<sup>19</sup>

5. Penelitian dari Ahmad Zuhairuz Zaman yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan Program Bedah Rumah Warga Bersama Lazisnu Umbulsari Jember”, *Journal of Community Engagement Vol.5 No.1*, 2023. Universitas Al-Falah As-Sunniyyah. Penelitian ini membahas tentang upaya untuk membantu warga yang termasuk dalam kaum du'afa agar dapat memiliki standar hidup yang sama dalam hal perumahan. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode Empowerment-Based Research yaitu pemberdayaan masyarakat melalui ruang pengabdian yang berdasarkan pada temuan riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terlaksananya program bedah rumah sehingga tempat tinggal yang lebih memadai. Selain itu, masyarakat juga memperlihatkan

---

<sup>19</sup>Nengah Sinarta, “Program Bedah Rumah Sebagai Bentuk Sosial Untuk Minimalisir Rumah Tidak Layak Huni”, *Jurnal Jurnal Abdi Daya*, Vol. 2, No. 1, (2022), 31-38.

kesadaran yang lebih besar dalam menjaga kegiatan gotong-royong sebagai modal sosial yang positif.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian yang akan saya lakukan berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokusnya tidak hanya pada efektivitas Program Bedah Rumah dalam mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kualitas rumah, tetapi juga menyoroti fungsi laten perangkat desa dalam pelaksanaan program ini. Sementara penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat, dampak sosial, atau upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana perangkat desa memainkan peran penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam keberhasilan program tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengeksplorasi dimensi tersembunyi atau fungsi laten dari perangkat desa yang belum dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menganut gagasan dari Robert K. Merton tentang fungsionalisme struktural, sehingga akan terlihat apa fungsi laten dari perangkat desa dalam program bedah rumah.

---

<sup>20</sup>Ahmad Zuhairuz Zaman, "Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan Program Bedah Rumah Warga Bersama Lazisnu Umbulsari Jember", *Journal of Community Engagement*, Vol. 5, No. 1, (2023), 1-16.